



LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2016

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2017



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Laporan Kinerja juga memberikan gambaran mengenai pencapaian kinerja dan merupakan bahan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2016 dan didasari oleh Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Di samping itu, pedoman utama yang juga dijadikan acuan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Capaian kinerja sasaran strategis Tahun 2016 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat secara ringkas diuraikan sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kategori Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	0,53%	0,34 %	63,36 % (Sedang)
		Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	3,93 %	2,29%	58,34 % (Sedang)
		Jumlah LPK yang terakreditasi	30 LPK	21 LPK	70 % (Sedang)



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kategori Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase serapan tenaga kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	87,45 %	72,16 %	82,51 % (Baik)
		Jumlah wirausaha baru	1.000 orang	640 orang	64 % (Sedang)
3.	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	65 %	90,70 %	139,54 % (Sangat Baik)
4.	Terwujudnya pelaksanaan norma ketenagakerjaan di tempat kerja	Persentase penurunan jumlah kecelakaan kerja	19,14 %	-7,20 %	-37,60 % (Kurang)
		Jumlah PPTKIS yang beroperasi sesuai prosedur	125 lembaga	202 lembaga	161,60 % (Sangat Baik)
		Persentase penyelesaian kasus TKI-B	25 %	63,64 %	254,55% (Sangat Baik)
5.	Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja	Persentase kenaikan UMK	5%	14,59 %	291,80 % (Sangat Baik)
6.	Meningkatnya kesiapan calon transmigran sebelum ditempatkan di daerah penempatan transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang memiliki sertifikat pelatihan	180 KK	206 KK	114,44 % (Sangat Baik)

Secara umum capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dapat dikategorikan "Sangat Baik" dengan capaian kinerja sebesar 114.78 %.



Untuk mencapai kinerja tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 didukung oleh sumber pendanaan yang ditetapkan sebesar Rp. 82,745,870,475,- terdiri atas dana APBD sebesar Rp 64,507,779,475,- dan dana APBN sebesar Rp 18,238,091,000,-. APBD terealisasi sampai dengan bulan Desember 2016 sebesar Rp 64,507,779,475,- atau 95.13% dan Fisik sebesar 98.01%, sedangkan dan APBN realisasi sampai dengan bulan Desember 2016 sebesar Rp 17,943,754,805,- atau 98.39% dan Fisik sebesar 98.39%.

Bandung, Januari 2017

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Ir. FERRY SOFWAN ARIF, M.Si.
Pembina Utama Madya
19621121 198909 1 001



KATA PENGANTAR

Akuntabilitas kinerja adalah suatu kewajiban organisasi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 juga merupakan wujud pelaksanaan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai pertanggungjawaban kepala instansi kepada atasan, dalam hal ini Gubernur Jawa Barat, dan kepada publik mengenai gambaran kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016 ini sehingga dapat tersusun dengan baik.



Semoga pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 ini akan semakin meningkatkan optimasi pelayanan publik di masa mendatang khususnya di Jawa Barat.

Bandung, Januari 2017

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Ir. FERRY SOFWAN ARIF, M.Si.
Pembina Utama Madya
19621121 198909 1 001



DAFTAR ISI

	Hal
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penulisan	3
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Tugas dan Fungsi	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis Tahun 2013-2018	7
2.2 Perencanaan Kinerja Tahun 2016	11
2.3 Dukungan Anggaran	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Capaian Kinerja	15
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2016	16
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Tahun 2013-2018	19
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Standar Pelayanan Minimal	21
3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja	26
3.1.5 Rencana Tindaklanjut	27
3.1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35
3.2 Realisasi Anggaran	36



BAB IV P E N U T U P

44

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

- Lampiran 1 : Indikator Kinerja (IKU) 2013-2018
- Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja (PK)
- Lampiran 3 Rencana Kerja Tahun 2016
- Lampiran 4 : Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2016
- Lampiran 6 : Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Tahun 2016
- Lampiran 7 : Monitoring Dan Evaluasi Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2016
- Lampiran 8 Cascading Tahun 2016
- Lampiran 9 Pohon Kinerja Tahun 2016





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan sasaran-sasaran dan indikator ketercapaiannya yang secara rinci ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa Laporan Kinerja yang disampaikan kepada atasan kepala instansi, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Dalam rangka pelaksanaan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat menyusun Laporan Kinerja periode Tahun 2016.

Sejalan dengan tugas dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat menghadapi permasalahan utama ketenagakerjaan yaitu tingginya angka pengangguran terbuka. Sementara itu di bidang ketransmigrasian permasalahan yang timbul muncul secara eksternal karena masih sentralistiknya mekanisme pengiriman transmigran.

Secara spesifik permasalahan di bidang ketenagakerjaan antara lain:

a. Pada masa sebelum bekerja:

1. Kualitas tenaga kerja masih rendah,
2. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata,
3. Tingginya tingkat pengangguran terbuka usia muda dengan pendidikan SMA ke bawah,
4. Rendahnya akses terhadap lapangan kerja.

b. Pada masa selama bekerja:

1. Produktivitas tenaga kerja masih rendah,
2. Hubungan Industrial belum kondusif,
3. Kesejahteraan pekerja / buruh masih rendah,
4. Perlindungan tenaga kerja masih rendah.

c. Pada masa setelah bekerja:

1. Peluang untuk bekerja kembali terbatas,



2. Minat untuk berwirausaha setelah bekerja rendah,
3. Fasilitasi purna tenaga kerja terbatas.

1.2 Tujuan

Laporan Kinerja disusun dengan tujuan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2016 berdasarkan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 serta Indikator Kinerja Utama Tahun 2016.

1.3 Dasar Hukum

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang perubahan terhadap Undang-undang No. 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



9. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah tahun 2008 Nomor 20 seri D, tambahan lembaran Daerah Nomor 55);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
15. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4 Tugas dan Fungsi

Adapun tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor : 71 tahun 2009, pasal 2 ayat 1, Dinas



Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok : melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, meliputi sub urusan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, sub urusan penempatan tenaga kerja, sub urusan hubungan industrial, sub urusan pengawasan ketenagakerjaan, sub urusan perencanaan penyiapan pemindahan transmigran yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- d. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat mempunyai peran penting dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sebagai salah satu target pembangunan Jawa Barat. Untuk mewujudkan hal dimaksud telah ditetapkan berbagai program dan kegiatan secara terencana sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas.



1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja ini adalah sebagai berikut:

Bab I menyajikan latar belakang, tujuan, dasar hukum, tugas pokok dan fungsi OPD serta sistematika penulisan.

Bab II difokuskan pada perencanaan kinerja yang meliputi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang dialami pada Tahun Anggaran 2016.

Bab III membahas akuntabilitas kinerja yang meliputi capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.

Bab IV menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat memiliki keterkaitan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat sebagai leading sector dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Jawa Barat bertanggungjawab untuk mengawal capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah sebagai berikut :

VISI	MISI	SASARAN	IKU PROV. JABAR	TARGET TAHUN 2016
Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua	Misi Ke 2 : Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan	Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,00 – 67,00 %
	Misi Ke 5 : Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Daerah Dan Kualitas Demokrasi	Sasaran 1: Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,50 – 7,00 %

2.1 Rencana Strategis Tahun 2013-2018

a. Visi dan Misi



Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 yakni "Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua". Sejalan dengan visi tersebut maka visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat menetapkan visi: ***"Terwujudnya Tenaga Kerja dan Transmigran yang Maju dan Sejahtera "***.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat telah merumuskan lima Misi pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja,
2. Meningkatkan Fasilitas Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja,
3. Meningkatkan Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan,
4. Meningkatkan Fasilitas Ketransmigrasian dan Kemandirian Transmigran,

Dalam menjabarkan lima misi tersebut, setiap misi diturunkan menjadi tujuan, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
2. Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
3. Meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan;
4. Meningkatnya kesiapan calon transmigran sebelum ditempatkan di daerah penempatan transmigrasi.

b. Strategi dan Kebijakan



Strategi pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian provinsi Jawa Barat kurun waktu 2013-2018 dirumuskan ke dalam 11 (sebelas) strategi yaitu:

1. Meningkatkan daya saing tenaga kerja;
2. Mendukung penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat berkebutuhan khusus (disabilitas);
3. Serapan 2 juta tenaga kerja melalui sektor primer, sekunder dan tersier dan mendukung penciptaan 100.000 wirausaha baru di Jawa Barat;
4. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan serta keterampilan wirausaha muda,
5. Memperluas kesempatan kerja;
6. Membina sarana hubungan industrial;
7. Meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh;
8. Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan;
9. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi purna tenaga kerja;
10. Mendukung terhadap terwujudnya kerjasama antar-daerah bidang ketransmigrasian melalui Forum KIE Transmigrasi;
11. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat transmigrasi;

Sedangkan kebijakan yang dirancang untuk mendukung strategi tersebut antara lain:

1. Memberikan fasilitasi bagi peningkatan kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing,
2. Memberikan fasilitasi perluasan kesempatan kerja, penempatan kerja (baik di dalam maupun di luar negeri), penciptaan wirausaha baru dan pembinaan purna-kerja,



3. Menyelesaikan kasus hubungan industrial secara cepat, tepat dan berkeadilan,
4. Memberikan fasilitasi kepada pekerja/buruh dalam rangka mencapai kesejahteraan,
5. Memberikan fasilitasi bagi pengawasan yang lebih intensif terhadap tenaga kerja,
6. Meningkatkan peran pekerja dan pengusaha dalam mewujudkan kelangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja,
7. Mendorong penyelenggaraan kerjasama antara daerah pengirim dengan daerah penempatan,
8. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat transmigrasi melalui pelatihan yang efektif,

c. Program Prioritas dan Pendukung

1. Program Priotas

- 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan keterampilan, keahlian, kompetensi tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
- 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja. Tujuan program ini adalah untuk mendorong penciptaan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja dalam rangka mengurangi penganggur dan setengah penganggur, baik di perdesaan maupun di perkotaan, serta memenuhi kebutuhan pasar kerja internasional.
- 3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Program ini bertujuan untuk menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis



melalui peningkatan pelaksanaan fungsi dan peranan sarana hubungan industrial.

4) Program Pengembangan Transmigrasi

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesiapan calon transmigran sebelum ditempatkan di daerah penempatan transmigrasi dan mendorong kewirausahaan masyarakat transmigrasi lokal (*translok/resettlement*) serta masyarakat sekitar translok.

2. Program Penunjang

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah.
- 2) Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur.
- 3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 5) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

2.2 Perencanaan Kinerja Tahun 2016

Kinerja organisasi pada dasarnya adalah bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan dan sasarannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan memperhatikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Perencanaan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 ditetapkan sebagai berikut:



Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	0,53%
		Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	3,93%
		Jumlah LPK yang terakreditasi	30 LPK
2.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase serapan tenaga kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	87,45%
		Jumlah wirausaha baru	1.000 orang
3.	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	65%
4.	Terwujudnya pelaksanaan norma ketenagakerjaan di tempat kerja	Persentase penurunan jumlah kecelakaan kerja	19,14%
		Jumlah PPTKIS yang beroperasi sesuai prosedur	125 lembaga
		Persentase penyelesaian kasus TKI-B	25%



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja	Persentase kenaikan UMK	5%
6.	Meningkatnya kesiapan calon transmigran sebelum ditempatkan di daerah penempatan transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang memiliki sertifikat pelatihan	180 KK

2.3 Dukungan Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat memperoleh dukungan anggaran dari APBD dan APBN melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Rincian pagu anggaran masing-masing program seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Pagu Anggaran APBD Tahun 2016

Program	Anggaran (Rp)
1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,365,526,350
2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	15,124,767,700
3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	3,477,295,000
4. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	5,500,085,000
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	819,537,300
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,577,207,000
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	6,340,877,900



Aparatur	
8. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,401,713,000
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	223,802,100
10. Program Pengembangan Transmigrasi	2,107,767,500
JUMLAH	40,938,578,850



Tabel 2.3
Pagu Anggaran APBN Tahun 2016

NO.	JENIS ANGGARAN/PROGRAM	PAGU DIPA (Rp.)	
		AWAL	REVISI
1	2	3	4
1.	Dekonsentrasi		
	1. Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja (04)	4,499,237,000	3,633,525,000
	2. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (05)	3,049,494,000	2,427,694,000
	3. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (08)	4,280,000,000	3,196,640,000
	4. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas (13)	4,660,970,000	4,649,310,000
JUMLAH I		16,489,701,000	13,907,169,000
2.	Tugas Pembantuan		
	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (07)	5,212,370,000	4,193,690,000
	2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (08)	137,232,000	137,232,000
JUMLAH II		5,349,602,000	4,330,922,000
JUMLAH I + II		21,839,303,000	18,238,091,000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja bertujuan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Penghitungan persentase pencapaian rencana kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Persentase Pencapaian}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi berikut :

SKALA NILAI	KATEGORI PENILAIAN
> 100 %	Sangat Baik
80 – 100 %	Baik
50 - < 80 %	Sedang
< 50 %	Kurang

Memperhatikan tugas dan fungsi, maka dalam menghitung pengukuran kinerja rumus yang digunakan adalah rumus 1 dan 2 seperti tersebut di atas.

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi Disnakertrans Provinsi Jawa Barat dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan.

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2016

Berikut ini perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja pada Tahun 2016.

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kategori Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	0,53%	0,34 %	63,36 % (Sedang)



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kategori Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	3,93 %	2,29%	58,34 % (Sedang)
		Jumlah LPK yang terakreditasi	30 LPK	21 LPK	70 % (Sedang)
2.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase serapan tenaga kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	87,45 %	72,16 %	82,51 % (Baik)
		Jumlah wirausaha baru	1.000 orang	640 orang	64 % (Sedang)
3.	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	65 %	90,70 %	139,54 % (Sangat Baik)
4.	Terwujudnya pelaksanaan norma ketenagakerjaan di tempat kerja	Persentase penurunan jumlah kecelakaan kerja	19,14 %	-7,20 %	-37,60 % (Kurang)
		Jumlah PPTKIS yang beroperasi sesuai prosedur	125 lembaga	202 lembaga	161,60 % (Sangat Baik)
		Persentase penyelesaian kasus TKI-B	25 %	63,64 %	254,55% (Sangat Baik)
5.	Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja	Persentase kenaikan UMK	5%	14,59 %	291,80 % (Sangat Baik)



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kategori Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Meningkatnya kesiapan calon transmigran sebelum ditempatkan di daerah penempatan transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang memiliki sertifikat pelatihan	180 KK	206 KK	114,44 % (Sangat Baik)



3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Tahun 2013-2018

Berikut ini realisasi kinerja Tahun 2016 dibandingkan dengan target jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Disnakertrans Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Tabel 3.2

Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Tahun 2013-2018

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Awal	Capaian Kinerja pada Tahun			Target Kinerja Sasaran pada Tahun		Sampai Tahun 2018	Ket.
				2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	1. Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	0,47 %	0,21	0,38	0,34	0,57	0,56	0,56%	Target Tahunan
			2. Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	3,94%	1,69	2,78	2,29	3,63	3,48	3,48%	Target Tahunan
			3. Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi	33 LPK	13	45	21	30	30	161 LPK	Target Akumulasi
2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	1. Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	85,17%	85,93	75,79	72,16	88,21	88,97	88,97%	Target Tahunan
			2. Jumlah wirausaha baru	570 orang	1.180	3380	640	1.000	400	6.000 orang	Target Akumulasi



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Awal	Capaian Kinerja pada Tahun			Target Kinerja Sasaran pada Tahun		Sampai Tahun 2018	Ket.
				2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
3	Meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan	1 Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis	1. Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	50%	55	94	90,70	70	75	75%	Target Tahunan
		2 Terwujudnya pelaksanaan norma ketenagakerjaan di tempat kerja	1. Persentase penurunan jumlah kecelakaan kerja	9,07%	9,97	28,35	-7,20	23,68	31,45	31,45%	Target Tahunan
			2. Jumlah PPTKIS yang beroperasi sesuai prosedur	50 lembaga	75	101	202	150	175	675 lembaga	Target Akumulasi
			3. Persentase penyelesaian kasus TKI-B	10%	15	72,99	63,64	30	35	35%	Target Tahunan
		3 Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja	1 Persentase kenaikan UMK	5%	5	14,79	14,59	5	5	5%	Target Tahunan



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Awal	Capaian Kinerja pada Tahun			Target Kinerja Sasaran pada Tahun		Sampai Tahun 2018	Ket.
				2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
4	Meningkatnya kesiapan calon transmigran sebelum ditempatkan di daerah penempatan transmigrasi	Meningkatnya kesiapan calon transmigran sebelum ditempatkan di daerah penempatan transmigrasi	1 Jumlah calon transmigran yang memiliki sertifikat pelatihan	423 KK	87	309	206	210	230	1.280 KK	Target Akumulasi

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Standar Pelayanan Minimal

Kementerian Ketenagakerjaan RI telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal bidang ketenagakerjaan. Sebagai perbandingan, realisasi capaiannya pada Tahun 2016 tersedia pada Tabel 3.3 berikut ini.



Tabel 3.3

Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2016

TAHUN 2016	Tenaga kerja yang dilatih	Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	Nilai SPM Pelayanan pada akhir tahun pencapaian SPM $\Sigma (2) / \Sigma (3) \times 100\%$	Sumber data dan Rujukan
	(jumlah)	(jumlah)	%	
1	2	3	4	5
Januari- Desember	800	981	81.55%	Sumber data pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat, dan pelatihan kewirausahaan berasal dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi, dan kabupaten/kota.
TAHUN 2016	Tenaga kerja yang dilatih	Pendaftar pelatihan kewirausahaan	Nilai SPM Pelayanan pada akhir tahun pencapaian SPM $\Sigma (2) / \Sigma (3) \times 100\%$	Sumber data dan Rujukan
Januari- Desember	640	708	90,40 %	Sumber data pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat, dan pelatihan kewirausahaan berasal dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi, dan kabupaten/kota.



TAHUN 2016	Pencari kerja yang ditempatkan	Pencari kerja yang terdaftar *)	Nilai SPM Pelayanan pada akhir tahun pencapaian SPM $\Sigma (2) / \Sigma (3) \times 100\%$	Sumber data dan Rujukan
Januari- Desember	401.271	556.118	72,16 %	Data jumlah pencari kerja yang terdaftar dan data jumlah pencari kerja yang ditempatkan yang diperoleh dari :
				1 dinas kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan;
				2 kantor perwakilan penempatan tenaga kerja;
				3 perusahaan pemberi kerja yang mendaftarkan lowongan kerja pada dinas kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan berdasarkan hasil job canvassing, telepon, faksimili, email, maupun secara langsung melalui bagian human resources development;
				4 laporan dari perusahaan pemberi kerja, perusahaan penyedia jasa pekerja dan bursa kerja khusus mengenai penempatan tenaga kerja yang direkrut melaluidinas kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan.
				5 *) Data Laporan Informasi Pasar Kerja Kab./Kota Jawa Barat, Desember 2016



TAHUN 2016	Kasus yang diselesaikan dengan PB	Kasus yang dicatatkan	Nilai SPM Pelayanan pada akhir tahun pencapaian SPM $\Sigma (2) / \Sigma (3) \times 100\%$	Sumber data dan Rujukan
Januari-Desember	712	785	90,70 %	Data jumlah kasus yang diselesaikan di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui Perjanjian Bersama (PB) dan data jumlah kasus yang dicatatkan diperoleh dari dinas provinsi, kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan
TAHUN 2016	Jumlah Perusahaan yang telah diperiksa	Jumlah Perusahaan yang terdaftar	Nilai SPM Pelayanan pada akhir tahun pencapaian SPM $\Sigma (2) / \Sigma (3) \times 100\%$	Sumber data dan Rujukan
Januari-Desember	2.168	32.616	6,65 %	Dinas provinsi dan kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan
TAHUN 2016	Jumlah pekerja/buruh peserta JAMSOSTEK.	Jumlah pekerja/buruh *)	Nilai SPM Pelayanan pada akhir tahun pencapaian SPM $\Sigma (2) / \Sigma (3) \times 100\%$	Sumber data dan Rujukan
Januari-Desember	2,316,515	19,202,038	12,06	Data jumlah pekerja/buruh dan jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta JAMSOSTEK yang diperoleh dari : 1) dinas provinsi dan kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan; 2) Badan Pusat Statistik (BPS) *); 3) BPJS Ketenagakerjaan.



TAHUN 2016	Jumlah Peralatan yang telah diuji	Jumlah peralatan yang terdaftar	Nilai SPM Pelayanan pada akhir tahun pencapaian SPM $\Sigma (2) / \Sigma (3) \times 100\%$	Sumber data dan Rujukan
Januari- Desember	4.321	46.860	9,22 %	Dinas provinsi dan kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan



3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja

Berdasarkan data pada Tabel 3.1 terlihat bahwa dari 11 indikator sasaran strategis, sebanyak 6 indikator tercapai sangat baik (di atas 100%), 1 indikator tercapai baik (80 - 100%), 4 indikator tercapai sedang (50 - 80%) dan sebanyak 1 indikator tercapai kurang (< 50)

Indikator yang tercapai dengan baik dan sangat baik disebabkan oleh perencanaan yang baik dan dilaksanakan dengan konsisten. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan target erat kaitannya dengan perencanaan anggaran karena volume output yang dikeluarkan tergantung dari seberapa banyak anggaran yang tersedia. Beberapa indikator yang tercapai melebihi target juga disebabkan karena "tidak terganggu" oleh pemotongan anggaran.

Demikian juga halnya dengan indikator yang tidak memenuhi target. Dari Tabel 3.1 terlihat ada 5 indikator yang realisasinya kurang dari target, yaitu persentase pencari kerja yang terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi, persentase pencari kerja yang terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan, Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi dan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier, Jumlah wirausaha baru serta Persentase penurunan jumlah kecelakaan kerja.

Selain itu sarana hubungan industrial yang aktif juga memerlukan sumber daya manusia yang memadai khususnya pegawai Fungsional Mediator dan Pengawas Ketenagakerjaan.



Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan penciptaan kesempatan kerja dan pemberdayaan sarana hubungan industrial antara lain:

1. Menyusun konsep perlindungan ketenagakerjaan yang efektif bersama dengan stakeholders dan menuangkannya dalam rencana kerja formal; dan
2. Mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang punya keterkaitan dengan pemberdayaan sarana hubungan industrial.

3.1.5. Rencana Tindaklanjut

Guna menindaklanjuti hasil analisis keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja tahun 2016, maka untuk tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat akan menganggarkan program kegiatan sebagai berikut :



Tabel 3.4

RENCANA TINDAKLANJUT PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASASARN	Target Kinerja sasaran				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGU NG JAWAB
			Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV						
1.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	0.14	0.29	0.43	0.57	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja					
							Uji Kompetensi Tenaga Kerja	Terujinya kompetensi tenaga kerja	12 Angkatan/240 Orang	Pengujian kompetensi terhadap penganggur	829,279,000	Bidang Lattas
		Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	0.91	1.82	2.72	3.63	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja					
							Pemagangan Dalam dan Luar Negeri	- Seleksi Pemagangan ke Luar Negeri (Jepang) - Pemagangan Dalam Negeri	- 300 orang (1 angkatan) - 60 orang (3 angkatan)	Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja bagi tenaga kerja	723,760,000	Bidang Lattas
							Bimtek Produktivitas Pengembangan Usaha Mikro Kecil	Terlaksananya Bimtek Produktivitas Pengembangan Usaha Mikro Kecil	20 orang (1 angkatan)	Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian dalam manajemen usaha	144,500,000	Bidang Lattas
							Workshop Jabar Mengembara	Masyarakat mendapatkan informasi bekerja dengan mekanisme AKAD-AKAN-AKAL	150 orang/3 lokasi	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya persiapan sebelum bekerja	147,000,000	BPPTKI
							Pelatihan bagi Purna TKI	Purna TKI yang memiliki kemampuan untuk berwirausaha	1 angkatan/20 orang	Pelatihan wirausaha baru bagi Purna TKI sebanyak 20 orang/1 angkatan	236,600,000	BPPTKLN



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASASARN	Target Kinerja sasaran				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGU NG JAWAB
			Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV						
							Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Tersedianya Tenaga Kerja yang Trampil dan Kompeten	160 Orang/2 angkatan	Pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja	1,221,680,600	BPK
							Pelatihan Kerja Mandiri Melalui Mobile Training Unit (MTU)	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan masyarakat Jawa Barat dibidang wirausaha	5 angkatan (150 Orang)	Pelatihan kewirausahaan melalui mobile training unit (MTU)	900,000,000	BPKM
							Pelatihan Kerja Mandiri Sesuai Minat Usaha	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan masyarakat Jawa Barat yang mempunyai arah minat usaha mandiri	2 angkatan (40 Orang)	Melaksanakan Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Arah Minat Usaha Mandiri	394,000,000	BPKM
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi	10	20	25	30	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja					
							Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	- Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja - Bimtek Akreditasi	- 20 LPK - 20 orang (1 akt)	Melaksanakan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Bimbingan Teknis Asesor Akreditasi LPK	237,800,000	Bidang Lattas
2.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	22.05	44.11	66.16	88.21	Program Peningkatan Kesempatan Kerja					
							Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal (AKL)	Tersedia calon tenaga kerja yang memiliki keterampilan menjahit di sektor industri garment sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan.	2 Angkatan/100 Orang	Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal pada Sektor Garment.	362,200,000	Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASASARN	Target Kinerja sasaran				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGU NG JAWAB
			Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV						
							Pengendalian dan Layanan Terhadap Pengguna Tenaga Kerja Asing	Terkumpulnya data tentang masa kerja Tenaga Kerja Asing dalam rangka alih teknologi dan pengetahuan	sebanyak 300 Perusahaan/ Lembaga	Pengendalian dan Layanan Terhadap Pengguna Tenaga Kerja Asing di Perusahaan/ Lembaga/ Instansi yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	100,000,000	Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Perluasan Lapangan Kerja melalui Padat Karya Pemberdayaan Lingkungan	Terserapnya tenaga kerja secara temporer pada kegiatan perluasan lapangan kerja melalui padat karya pemberdayaan lingkungan	23 Lokasi di Jawa Barat sebanyak 1.625 orang	Melaksanakan Padat karya pemberdayaan lingkungan di Jawa Barat	1,093,484,000	Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Perluasan Lapangan Kerja melalui Padat Karya Infrastruktur Pengerasan Jalan	Tersenyernya tenaga kerja pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa	12 lokasi/660 orang	Padat karya infrastruktur pengerasan jalan dapat memberikan kesempatan kerja secara temporer kepada tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur	1,116,650,000	Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Dukungan Penciptaan 2 Juta Serapan Kesempatan Kerja	Terdatanya jumlah Penyerapan 2 juta kesempatan kerja melalui sektor primer, sekunder dan Tersier	365.250 Orang / Tenaga Kerja	Pendataan lapangan kerja dengan melibatkan petugas Teknis aplikasi 2 juta KK, petugas Front Office GLIK dan Kab./Kota	641,000,000	Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Pengembangan Informasi Pasar Kerja	- Penyuluhan Bimbingan Jabatan - Bimtek BKK - Layanan Antar Kerja dan Konseling	- 24 Kali - 1 Kali - 24 Kali	- Penyuluhan Bimbingan Jabatan - Bimtek BKK - Layanan Antar Kerja dan Konseling	428,090,000	Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASASARN	Target Kinerja sasaran				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGU NG JAWAB
			Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV						
							Bursa Kerja	Meningkatnya penyampaian informasi pasar kerja secara efektif kepada pencari kerja	2 lokasi	Penyebaran Informasi lowongan kerja kepada pencari kerja sebanyak 2 lokasi	342,850,000	Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jumlah wirausaha baru	250	500	750	1,000	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja					
							Bimtek Produktivitas Pengembangan Usaha Mikro Kecil	Terlaksananya Bimtek Produktivitas Pengembangan Usaha Mikro Kecil	20 orang (1 angkatan)	Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian dalam manajemen usaha	144,500,000	Bidang Lattas
							Pelatihan bagi Purna TKI	Purna TKI yang memiliki kemampuan untuk berwirausaha	1 angkatan/20 orang	Pelatihan wirausaha baru bagi Purna TKI sebanyak 20 orang/1 angkatan	236,600,000	BPPTKLN
							Pelatihan Kerja Mandiri Melalui Mobile Training Unit (MTU)	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan masyarakat Jawa Barat dibidang wirausaha	5 angkatan (150 Orang)	Pelatihan kewirausahaan melalui mobile training unit (MTU)	900,000,000	BPKM
							Pelatihan Kerja Mandiri Sesuai Minat Usaha	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan masyarakat Jawa Barat yang mempunyai arah minat usaha mandiri	2 angkatan (40 Orang)	Melaksanakan Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Arah Minat Usaha Mandiri	440,000,000	BPKM
							Program Peningkatan Kesempatan Kerja					
							Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas	Terserapnya Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas pasca Pembekalan.	1 Angkatan/50 Orang	Penempatan/pemberda yaan tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebanyak 50 Orang.	194,775,000	Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASASARN	Target Kinerja sasaran				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGU NG JAWAB
			Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV						
3.	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	10.00	30.00	50.00	70.00	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan					
							Rakor LKS Tripartit Provinsi Jawa Barat dan LKS Tripartit Kabupaten/Kota	Rapat Koordinasi LKS Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota	111 orang	Rapat Koordinasi LKS Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota	200,000,000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
							Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Data Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang digunakan untuk menentukan keterwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Lembaga Ketenagakerjaan di tingkat provinsi : LKS Tripartit Provinsi Jawa Barat dan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat	1 kegiatan	Pendataan Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang digunakan untuk menentukan keterwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Lembaga Ketenagakerjaan di tingkat provinsi : LKS Tripartit Provinsi Jawa Barat dan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat	135,000,000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
							Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Provinsi dan kabupaten/Kota	Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Provinsi dan Kabupaten/Kota	20 persh.	Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Provinsi dan Kabupaten/Kota	320,000,000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
4.	Terwujudnya pelaksanaan norma ketenagakerjaan di tempat kerja	Persentase penurunan jumlah kecelakaan kerja	5.92	11.84	17.76	23.68	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan					
							Penyebarluasan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan	Penyebarluasan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan	10 orang	Penyebarluasan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan	100,000,000	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASASARN	Target Kinerja sasaran				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGU NG JAWAB
			Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV						
							Gerakan Efektif Masyarakat Membudayakan K3	Gerakan Efektif Membudayakan K3	10 orang	Gerakan Efektif Membudayakan K3	200,000,000	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
		Jumlah PPTKIS yang beroperasi sesuai prosedur		150		150	Program Peningkatan Kesempatan Kerja					
							Peningkatan Kapasitas PPTKIS	Meningkatkan jumlah PPTKIS yang beroperasi sesuai prosedur	40 orang	Melaksanakan kegiatan Pembinaan PPTKIS	230,177,000	BPPTKLN
		Persentase penyelesaian kasus TKI-B	10	20	25	30	Program Peningkatan Kesempatan Kerja					
							Rapat Satgas Pelayanan TKI Terpadu (4 bidang) dan Satgas TKI Non Prosedural	Notulen kesepakatan	30 orang	Satgas TKI yang terintegrasi	66,023,000	BPPTKLN
							Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan TKI asal Jawa Barat	- Dokumen/laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi pelaksanaan Pelayanan TKI asal Jawa Barat - Data TKI yang melalui Bandara - Pelayanan TKI yang terintegrasi	3 dokumen laporan	Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI	200,000,000	BPPTKLN
5.	Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja	Persentase kenaikan UMK	5.00	5.00	5.00	5.00	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan					
							Penerapan Sistem Pengupahan di Jawa barat	Terlaksananya Kegiatan Penerapan Sistem Pengupahan di Jawa Barat	7 Kegiatan	Penerapan Sistem Pengupahan di Jawa barat	984,028,000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASASARN	Target Kinerja sasaran				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGU NG JAWAB
			Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV						
							Peningkatan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jawa Barat	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jawa Barat	1 Kegiatan	Sosialisasi Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja di Jawa Barat	89,360,000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
6.	Meningkatnya kesiapan calon transmigran sebelum ditempatkan di daerah penempatan transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang memiliki sertifikat pelatihan				210	Program Pengembangan Transmigrasi					
							Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KSAD) Bidang Transmigrasi	- Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah Bidang Ketransmigrasian 1 Kali - Evaluasi Keberhasilan Transmigrasi 3 Provinsi - Terlaksananya Tindak Lanjut KSAD Bidang Ketransmigrasian 1 Provinsi	3 kegiatan	Melaksanakan Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KSAD) Bidang Transmigrasi; Koordinasi Antar Daerah Pengirim; Evaluasi Keberhasilan Transmigrasi; Tindak Lanjut Kerjasama Antar Daerah Bidang Transmigrasi; Jabar Mengembara	415,000,000	Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Pembinaan dan Supervisi Masyarakat Transmigrasi Lokal	-Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan ekonomi produktif	21 KUB;	Melakukan Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan ekonomi produktif	100,795,000	Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Pengembangan Lahan Praktek (Demplot) Pelatihan Kerja Mandiri	- Pengelolaan lahan praktek (Demplot) pelatihan kerja mandiri 2,4 Ha - Petugas/pengelola lahan praktek (Demplot) pelatihan kerja mandiri 39 OB	1 Tahun	Meningkatkan kapasitas fungsi lahan praktek (Demplot) pelatihan ketransmigrasian dan kewirausahaan untuk menunjang operasional pelatihan ketransmigrasian dan kewirausahaan	285,000,000	BPKM



3.1.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumberdaya yang digunakan terdiri atas sumber daya manusia dan anggaran. Dari sisi sumber daya manusia dapat dikatakan bahwa Disnakertrans Provinsi Jawa Barat memiliki kualitas pegawai yang cukup baik. Parameternya dapat dilihat dari proporsi pendidikan terakhir pegawai yang paling besar adalah lulusan perguruan tinggi sebesar 55,50 %.

Data pendidikan pegawai dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5

**REKAPITULASI JUMLAH PNS BERDASARKAN JENIS PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA BARAT PERIODE DESEMBER 2016**

NO	UNIT KERJA	JENIS PENDIDIKAN								JENIS KELAMIN		
		S3	S2	S1	Dipl	SLTA	SLTP	SD	Jumlah	PRIA	WANITA	Jumlah
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat - Fungsional Angka Kredit	1	21	20	5	42	4	6	99	65	34	99
		0	1	13	1	2	0	0	17	10	7	17
2	Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi - Fungsional Angka Kredit	0	3	3	4	11	0	0	21	11	10	21
		0	0	11	5	3	0	0	19	18	1	19
3	Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Luar Negeri	0	2	2	5	9	0	0	18	7	11	18
												0
4	Balai Pelatihan Ketransmigrasi dan Kewirausahaan	0	0	6	0	3	0	1	10	5	5	10
												0
5	Balai Pelayanan TKI Terpadu	0	2	1	0	2	1	1	7	4	3	7
Jumlah		1	29	56	20	72	5	8	191	120	71	191



Sementara itu jika dilihat dari sisi kualitas pegawai, maka perlu ada penambahan pegawai fungsional ketenagakerjaan.

Dari sisi sumber daya anggaran, serapan anggaran Disnakertrans Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 sebesar 95,13% dengan capaian Fisik sebesar 98,01%.

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran yang terdapat di Disnakertrans Provinsi Jawa Barat terdiri atas APBD dan APBN. Anggaran dari APBN terdiri atas dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. Pagu anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada Tabel 3.6 dan Tabel 3.7 berikut ini.



Tabel 3.6
Pagu Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2016

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN	REALISASI		REALISASI FISIK (%)
				KEUANGAN (Rp)	%	
	BELANJA		67,811,725,837	64,507,779,475	95.13	98.01
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG		26,873,146,987	25,749,320,772	95.82	100.00
	Gaji dan Tunjangan Pegawai		26,873,146,987			
	BELANJA LANGSUNG		40,938,578,850	38,758,458,703	94.67	
29	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		1,365,526,350	1,355,093,210	99.24	
29.01	Penyebaran Informasi Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian	Jawa Barat	360,032,000	356,928,000	99.14	100.00
29.02	Perencanaan Program Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian Disnakertrans	Jawa Barat	512,425,000	507,565,960	99.05	100.00
29.03	Perencanaan Program Dan Kegiatan UPTD Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi	Bekasi	216,217,000	216,127,900	99.96	100.00
29.04	Pengembangan Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri	Jawa Barat	139,077,350	136,696,350	98.29	100.00
29.05	Perencanaan Program Pelatihan Ketransmigrasian Dan Kewirausahaan	Jawa Barat	137,775,000	137,775,000	100.00	100.00
39	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		15,124,767,700	14,787,225,100	97.77	
39.01	Pelatihan Alih Profesi Bidang Jasa (Dampak Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati)	Kab Majalengka	413,345,500	406,845,500	98.43	100.00
39.2	Pelatihan Berbasis Masyarakat Melalui Mobile Training Unit (MTU)	Jawa Barat	886,927,000	880,144,000	99.24	100.00
39.03	Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Jawa Barat	384,750,000	303,827,000	78.97	79.03
39.04	Uji Kompetensi Tenaga Kerja	Jawa Barat	1,367,004,500	1,356,608,000	99.24	100.00
39.05	Bimbingan Teknis Produktivitas Tenaga Kerja	Jawa Barat	783,759,500	762,222,750	97.25	100.00



KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN	REALISASI		REALISASI FISIK (%)
				KEUANGAN (Rp)	%	
39.06	Pemagangan Dalam Negeri Dan Luar Negeri	Jawa Barat	995,890,000	987,810,550	99.19	100.00
39.07	Bimbingan Teknis Metodologi Instruktur LPK	Jawa Barat	168,675,000	144,895,000	85.90	93.15
39.08	DBHCHT Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau dan Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau di UPTD Disnakertrans Prov.Jawa Barat	Bekasi	1,878,621,000	1,799,269,000	95.78	100.00
39.09	Pelatihan Berbasis Kompetensi	Bekasi	1,792,434,200	1,792,434,150	100.00	100.00
39.10.	Pelatihan Bagi Purna TKI	Jawa Barat	853,407,000	811,787,800	95.12	100.00
39.11	Workshop Jabar Mengembara	Jawa Barat	267,450,000	267,400,000	99.98	100.00
39.12	Pelatihan Calon Tenaga Kerja Luar Negeri	Bandung	2,397,332,500	2,381,814,450	99.35	100.00
39.14	Pelatihan Kewirausahaan Melalui Mobile Training Unit (MTU)	Jawa Barat	577,625,000	577,377,500	99.96	100.00
39.15	Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Arah Minat Usaha Mandiri	Jawa Barat	813,190,000	813,110,000	99.99	100.00
39.16	Peningkatan Kualitas Sertifikasi Profesi	Jawa Barat	410,856,500	369,174,400	89.85	100.00
39.17	DBHCHT Pelatihan Penguatan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Melalui Perluasan Kesempatan Usaha Mandiri Tahun 2016	Jawa Barat	1,133,500,000	1,132,505,000	99.91	100.00
40	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		3,477,295,000	3,380,017,800	97.20	
40.01	Penyelenggaraan Kegiatan Dewan Pengupahan Provinsi	Jawa Barat	555,687,000	553,604,100	99.63	99.63
40.02	Komunikasi dan Koordinasi Pengupahan Se Jawa Barat	Jawa Barat	513,000,000	509,169,700	99.25	99.25
40.03	Koordinasi dan Monitoring Bidang Jamsoskes TK	Jawa Barat	128,250,000	126,715,000	98.80	98.80
40.04	Monitoring Penangguhan Pelaksanaan UMK	Jawa Barat	213,750,000	210,485,000	98.47	98.47
40.05	Sosialisasi Penyelenggaraan Fasilitas dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Jawa Barat	213,750,000	213,115,000	99.70	99.70



KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN	REALISASI		REALISASI FISIK (%)
				KEUANGAN (Rp)	%	
40.06	Pembinaan, Pemeriksaan Dan Pengujian Norma Ketenagakerjaan	Jawa Barat	290,728,000	289,553,000	99.60	100.00
40.07	Penyebarluasan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan	Jawa Barat	381,800,000	381,349,000	99.88	100.00
40.08	Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Jawa Barat	383,470,000	372,565,000	97.16	100.00
40.09	Bimtek Tatacara Pembuatan PP PKB Bagi Pekerja Dan Pengusaha	Jawa Barat	106,875,000	106,355,000	99.51	100.00
40.10	Rapat LKS Tripartit Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	102,600,000	46,800,000	45.61	51.52
40.11	Rapat Koordinasi LKS Tripartit Provinsi Jawa Barat Dan Kabupaten/Kota	Jawa Barat	198,360,000	197,252,000	99.44	100.00
40.12	Peningkatan Manajemen Organisasi Dan Negosiasi Serikat Pekerja Serikat Buruh	Jawa Barat	106,875,000	92,860,000	86.89	86.90
40.13	Penyuluhan Pembentukan LKS Bipartit	Jawa Barat	82,080,000	80,640,000	98.25	100.00
40.14	Pembinaan Dan Penyajian Data Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota	Jawa Barat	200,070,000	199,555,000	99.74	100.00
41	Program Peningkatan Kesempatan Kerja		5,500,085,000	5,439,537,050	98.90	
41.01	Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas	27 Kab/ Kota	300,450,000	300,450,000	100.00	100.00
41.03	Pembekalan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (AKL)	27 Kab/ Kota	504,619,000	504,619,000	100.00	100.00
41.04	Pengendalian dan Monitoring Terhadap Pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) di Jawa Barat	27 Kab/ Kota	173,000,000	172,620,000	99.78	100.00
41.05	Jejaring Kesempatan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Daerah (AKAD)	27 Kab/ Kota	180,000,000	153,169,000	85.09	86.96
41.06	Perluasan Lapangan Kerja Melalui Padat Karya Produktif Peternakan Dan Perikanan	Jawa Barat	18,616,000	18,616,000	100.00	100.00
41.07	Perluasan Lapangan Kerja Melalui Padat Karya Infrastruktur Pengerasan Jalan	Jawa Barat	630,000,000	629,955,000	99.99	100.00
41.08	Perluasan Lapangan Kerja Melalui Padat Karya Pemberdayaan Lingkungan	Jawa Barat	900,000,000	898,075,000	99.79	100.00
41.09	Pendataan Perluasan Kesempatan Kerja	Jawa Barat	564,000,000	562,700,000	99.77	100.00
41.11	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Jawa Barat	252,185,000	251,135,000	99.58	100.00
41.12	Bimbingan Teknis Pengurus Bursa Kerja Khusus (BKK)	Jawa Barat	148,855,000	148,855,000	100.00	100.00



KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN	REALISASI		REALISASI FISIK (%)
				KEUANGAN (Rp)	%	
41.13	Pendataan Informasi Pasar Kerja	Jawa Barat	85,500,000	85,500,000	100.00	100.00
41.14	Layanan Antar Kerja dan Konseling	Jawa Barat	65,000,000	65,000,000	100.00	100.00
41.15	Bursa Kerja	Jawa Barat	364,360,000	364,350,000	100.00	100.00
41.16	Penyebaran Informasi Pencegahan TKI Non Prosedural	Jawa Barat	128,250,000	128,192,000	99.95	100.00
41.17	Pembinaan PPTKIS dan Fasilitas Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)	Jawa Barat	127,750,000	125,500,000	98.24	100.00
41.18	Peningkatan Kapasitas Satuan Tugas Pelayanan TKI Terpadu	Jawa Barat	360,000,000	336,919,000	93.59	96.27
41.19	Diseminasi Informasi Penempatan dan Perlindungan TKI Jawa Barat	Jawa Barat	427,500,000	425,263,000	99.48	100.00
41.20.	Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan TKI	Jawa Barat, Prov Banten / DKI, Batam/Kepr i, 1 Negara Penempatan	270,000,000	268,619,050	99.49	100.00
59	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur		819,537,300	808,031,000	98.60	
59.01	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Disnakertrans	Jawa Barat	572,437,300	568,349,000	99.29	100.00
59.02	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi	Bekasi	76,500,000	75,200,000	98.30	100.00
59.03	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri	Bandung	63,700,000	62,632,000	98.32	100.00
59.04	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Balai Pelatihan Ketransmigrasian Dan Kewirausahaan	Jawa Barat	64,150,000	64,150,000	100.00	100.00
59.05	Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur BPTKI Terpadu	Bandung	42,750,000	37,700,000	88.19	100.00
60	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2,577,207,000	2,470,446,727	95.86	
60.01	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Disnakertrans	Bandung	1,309,804,000	1,302,705,094	99.46	100.00
60.02	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi	Bekasi	472,703,000	405,004,874	85.68	100.00



KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN	REALISASI		REALISASI FISIK (%)
				KEUANGAN (Rp)	%	
60.03	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri	Bandung	212,375,000	205,149,686	96.60	100.00
60.04	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pelatihan Ketransmigrasian Dan Kewirausahaan	Jawa Barat	389,950,000	370,365,645	94.98	100.00
60.05	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPTKI Terpadu	Jawa Barat	192,375,000	187,221,428	97.32	100.00
61	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		6,340,877,900	4,992,128,610	78.73	
61.01	Pembangunan Gedung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Bandung	4,023,290,500	4,012,040,500	99.72	100.00
61.02	Pengadaan Barang Prasarana Kantor Disnakertrans	Jawa Barat	266,094,000	260,694,000	97.97	100.00
61.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi	Bekasi	290,425,000	288,870,500	99.46	100.00
61.06	Pembangunan Gedung Asrama BLTKLN Tahap I	Bandung	1,761,068,400	430,523,610	24.45	30.00
62	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur		3,401,713,000	3,309,513,631	97.29	
62.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Disnakertrans	Bandung	1,220,200,000	1,168,829,648	95.79	100.00
62.02	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi	Bekasi	756,204,000	726,493,883	96.07	100.00
62.03	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BLTKLN	Bandung	433,659,000	431,534,600	99.51	100.00
62.04	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Balai Pelatihan Ketransmigrasian Dan Kewirausahaan	Bandung	472,850,000	469,730,700	99.34	100.00
62.05	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana BPTKI Terpadu	Bandung	136,800,000	132,624,800	96.95	100.00
62.06	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung PHI	Bandung	382,000,000	380,300,000	99.55	100.00
66	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		223,802,100	223,602,322	99.91	
66.01	Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Internal Disnakertrans	Bandung	133,802,100	133,750,000	99.96	100.00



KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN	REALISASI		REALISASI FISIK (%)
				KEUANGAN (Rp)	%	
66.02	Pengelolaan Keuangan Disnakertrans	Bandung	90,000,000	89,852,322	99.84	100.00
101	Program Pengembangan Transmigrasi		2,107,767,500	1,992,863,253	94.55	
101.01	Sosialisasi Program Transmigrasi	26 Kab/ Kota	404,540,000	388,885,473	96.13	100.00
101.02	Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KSAD) Bidang Transmigrasi	26 Kab/ Kota	617,072,500	521,491,375	84.51	100.00
101.03	Pembinaan dan Supervisi Masyarakat Transmigrasi Lokal	21 UPT / 11 Kab/ Kota	203,280,000	202,187,205	99.46	100.00
101.04	Rapat Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Lokal	21 UPT / 11 Kab/ Kota	83,625,000	83,143,200	99.42	100.00
101.05	Pengembangan Lahan Praktek (Demplot) Pelatihan Ketransmigrasian Dan Kewirausahaan	Bandung	407,500,000	407,424,000	99.98	100.00
101.06	Pelatihan Calon Transmigran	Jawa Barat	391,750,000	389,732,000	99.48	100.00
	JUMLAH		67,811,725,837	64,507,779,475	95.13	



Tabel 3.7
Pagu Anggaran dan Realisasi APBN Tahun 2016

NO.	JENIS ANGGARAN/PROGRAM	PAGU DIPA (Rp.)		REALISASI S/D BULAN INI		
		AWAL	REVISI	KEUANGAN		FISIK (Bobot Tertimbang)
				(Rp.)	%	%
1.	Dekonsentrasi					
	1. Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja (04)	4,499,237,000	3,633,525,000	3,614,620,000	99.48	99.48
	2. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (05)	3,049,494,000	2,427,694,000	2,426,439,100	99.95	99.95
	3. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (08)	4,280,000,000	3,196,640,000	3,196,115,000	99.98	99.98
	4. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas (13)	4,660,970,000	4,649,310,000	4,630,520,000	99.60	99.60
JUMLAH I		16,489,701,000	13,907,169,000	13,867,694,100	99.72	99.72
2.	Tugas Pembantuan					
	1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (07)	5,212,370,000	4,193,690,000	3,941,240,825	93.98	93.98
	2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (08)	137,232,000	137,232,000	134,819,880	98.24	98.24
JUMLAH II		5,349,602,000	4,330,922,000	4,076,060,705	94.12	94.12
JUMLAH I + II		21,839,303,000	18,238,091,000	17,943,754,805	98.39	98.39



BAB IV

P E N U T U P

Dari hasil pengukuran kinerja yang telah dipaparkan pada Subbab 3.1.1 dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai yang diperoleh Disnakertrans Provinsi Jawa Barat sebesar 127,32 % atau dapat dikatakan "Sangat Baik".

Di masa mendatang langkah-langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan kinerja Disnakertrans Provinsi Jawa Barat antara lain:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Jawa Barat dalam rangka penciptaan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja;
- b. Koordinasi lebih intensif dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI. mengenai isu sentralisasi pengawasan ketenagakerjaan. Disadari bahwa pada saat ini jumlah fungsional pengawas dan mediator masih sangat kurang dibanding dengan beban pekerjaannya;
- c. Mengoptimalkan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi sebagai sarana meningkatkan daya tawar tenaga kerja Jawa Barat di kancah regional; dan
- d. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan ketransmigrasian dalam rangka pelaksanaan program transmigrasi yang berkualitas.